



## Kata Pengantar

---

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap satuan kerja Pemerintahan diwajibkan membuat Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

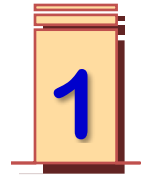
Dokumen Rencana Strategis ini merumuskan visi, misi, strategi, arah kebijakan dan langkah-langkah capaian kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2013 – 2018 yang disusun secara sistematis dan sinergis serta merupakan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur Dinas dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat di sektor peternakan dan perikanan. Penyusunan Restra Dinas tersebut mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas dan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Akhirnya semoga buku ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor peternakan dan perikanan di Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, Juli 2013  
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas



*Sugiyatno*  
Ir. H. SUGIYATNO, MM  
NIP. 19590915 198608 1 001



# Pendahuluan

## A. Latar Belakang

Pembangunan peternakan dan perikanan Kabupaten Banyumas disadari atau tidak selama ini memegang peranan penting dan strategis dalam membangun sektor pertanian khususnya dalam upaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pemberantasan kemiskinan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani ternak dan petani ikan serta peningkatan konsumsi protein hewani dalam rangka peningkatan kecerdasan masyarakat serta pemasukan pendapatan daerah. Perkembangan global saat ini mendorong banyak perubahan terutama tuntutan yang semakin tinggi akan hasil-hasil pembangunan peternakan dan perikanan yang mencukupi ketersediaannya, berkualitas dengan harga terjangkau.

Perubahan konsumsi protein hewani asal ternak dan ikan terutama karena pertumbuhan penduduk menyebabkan kenaikan permintaan akan hasil-hasil produk peternakan dan perikanan yang semakin tinggi selaras dengan kesadaran masyarakat akan kebutuhan pangan bergizi untuk pertumbuhan, kesehatan dan kecerdasan. Hal ini menyebabkan perubahan penanganan dalam tata cara produksi hasil peternakan dan perikanan, dengan intensifikasi serta penerapan teknologi terapan yang mudah dan murah. Disisi lain harus terus diberdayakan kemampuan sumberdaya manusia yang bergulat dalam sektor peternakan dan perikanan, baik di tingkat pengambil keputusan sampai kepada stakeholder di tingkat petani ternak maupun petani ikan melalui koordinasi,

---

pelatihan serta pengembangan kemampuan mengelola permodalan. Sementara dari sisi organisasi dan kelembagaan terdapat pergeseran dan perubahan kebijakan publik terhadap pembangunan peternakan dan perikanan.

Tuntutan akan hasil pembangunan peternakan dan perikanan yang semakin tinggi disertai pergeseran dan perubahan kebijakan pengendali pemerintahan harus di respon oleh seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan sehingga sebagai penanggung jawab sektor peternakan dan perikanan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas mempunyai peran yang sangat penting.

Sejalan dengan hal tersebut disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017 yang diharapkan dapat menjawab tantangan berupa keinginan-keinginan masyarakat akan hasil-hasil pembangunan peternakan dan perikanan yang cukup, berkualitas, berdaya saing serta dapat berpartisipasi dalam mengentaskan kemiskinan dengan penyerapan tenaga kerja masyarakat. Disamping itu penyusunan Renstra dapat digunakan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan peternakan dan perikanan sehingga dapat terlaksana secara sinergis, terintegrasi dan efektif.

Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018, Misi ke-3 yaitu mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi perdesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumberdaya manusia, akses pasar dan perlindungan dari Pemerintah, bidang urusan pertanian dan urusan kelautan dan perikanan. Selain berpedoman kepada RPJM Daerah, Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas juga mengacu kepada Renstra Dinas Peternakan dan Kehewan Provinsi Jateng, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng serta Renstra Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## **B. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017 didasarkan pada :

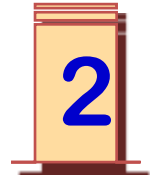
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Permendagri No. 13 Tahun 1006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Lampiran IV tentang Tahapan dan tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas; Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2013;
20. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
21. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas;
22. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018;

### C. Maksud dan Tujuan

**Maksud,** Penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas dimaksudkan untuk memberikan pedoman, acuan dan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas baik di jajaran struktural maupun fungsional dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas dan fungsi membangun peternakan dan perikanan Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2018.

**Tujuan,** Penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas bertujuan untuk merumuskan visi dan misi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2018, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada sektor peternakan dan perikanan. Disamping itu juga untuk menyusun target dan sasaran, menetapkan strategi, kebijakan dan program-program pembangunan peternakan dan perikanan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.



## Gambaran Pelayanan Dinnakkan Kab Banyumas

---

### 2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

#### 1. Kedudukan dan Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, maka Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

##### 1. Kedudukan

Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan tugas pembantuan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### 2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.

- 
- b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Subbagian Bina Program;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Umum;
  - c. Bidang Peternakan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Budidaya Peternakan;
    - 2. Seksi Bina Usaha Peternakan;
  - d. Bidang Perikanan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Budidaya Perikanan;
    - 2. Seksi Bina Usaha Perikanan;
  - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Ikan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Kesehatan Hewan;
    - Seksi Kesehatan Ikan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Secara rinci struktur organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas terdapat pada lampiran 1.

## **2. Tugas dan Fungsi**

Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas maka penjabaran tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut :

### **1. Tugas**

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional sebagian urusan pemerintahan daerah sub bidang peternakan dan kesehatan hewan dan sub bidang penunjang pada urusan pemerintahan daerah bidang pertanian dan ketahanan pangan serta sebagian urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

### **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis lingkup peternakan dan perikanan;

- 
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup peternakan dan perikanan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup peternakan dan perikanan;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ringkasan Tugas dan Rincian Tugas masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai ringkasan tugas memimpin pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan guna terwujudnya sinkronisasi, harmonisasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang peternakan dan perikanan.

#### **2. Sekretaris Dinas**

Sekretaris Dinas mempunyai ringkasan tugas mengkoordinasikan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas, administrasi keuangan, pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Dinas.

#### **3. Kepala Bidang Peternakan**

Kepala Bidang Peternakan mempunyai ringkasan tugas mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan pengawasan produksi peternakan, pakan, penyebaran, pengembangan dan sarana prasarana peternakan serta usaha bidang peternakan.

#### **4. Kepala Bidang Perikanan**

Kepala Bidang Perikanan mempunyai ringkasan tugas mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan bimbingan produksi dan penangkapan ikan, pelestarian sumber hayati perairan, pembinaan usaha bidang perikanan dalam rangka peningkatan produksi perikanan.



---

## 5. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Ikan

Kepala Bidang Perikanan mempunyai ringkasan tugas mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan perlindungan kesehatan hewan dan ikan, kesehatan masyarakat veteriner, penyidikan, pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit ternak dan ikan serta pengelolaan lingkungan dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan ikan.

Selain perangkat diatas, pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas dibentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT Pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas.

### 1. Kedudukan.

UPT adalah pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas.

### 2. Susunan Organisasi.

Susunan Organisasi UPT pada Dinas terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional;

Nomenklatur, tempat kedudukan dan wilayah kerja UPT pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

#### 1. UPT Rumah Pemotongan Hewan (RPH), terdiri dari :

- A. RPH Wilayah Timur / RPH Purwokerto Timur, berkedudukan di Kec Purwokerto Timur meliputi :
  1. RPH Purwokerto Timur dengan wilayah kerja Kec Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan dan Purwokerto Utara;
  2. RPH Sokaraja dengan wilayah kerja Kec Sokaraja dan Kalibagor;
  3. RPH Kembaran dengan wilayah kerja Kec Kembaran, Sumbang dan Baturraden;
  4. RPH Banyumas dengan wilayah kerja Kec Banyumas, Somagede dan Kebasen;
  5. RPH Sumpiuh dengan wilayah kerja Kec Sumpiuh, Tambak dan Kemranjen;

- 
- B. RPH Wilayah Barat / RPH Wangon, berkedudukan di Kec Wangon meliputi :
1. RPH Wangon dengan wilayah kerja Kec Wangon, Gumelar, Lumbir, Jatilawang dan Rawalo;
  2. RPH Purwokerto Barat dengan wilayah kerja Kec Purwokerto Barat, Kedungbanteng, Patikraja dan Karanglewas;
  3. RPH Cilongok dengan wilayah kerja Kec Cilongok dan Purwojati;
  4. RPH Ajibarang dengan wilayah kerja Kec Ajibarang dan Pekuncen;
- 2. UPT Balai Benih Ikan (BBI)**, berkedudukan di Kec Baturraden dengan wilayah kerja :
1. Balai Benih Ikan Pandak;
  2. Balai Benih Ikan Sidabowa;
  3. Balai Benih Ikan Tambaksogra;
  4. Balai Benih Ikan Singasari;
- 3. UPT Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**, berkedudukan di Kabupaten Banyumas dengan wilayah kerja Kabupaten Banyumas.

Selanjutnya sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas UPT Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas, tugas UPT dijabarkan sebagai berikut :

UPT Rumah Pemotongan Hewan (RPH) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Perikanan dalam pengelolaan pemotongan hewan ternak besar, kecil dan unggas di dalam dan luar RPH di wilayah kerjanya.

UPT Balai Benih Ikan (BBI) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Perikanan dalam budidaya ikan air tawar dan lingkungan serta induk ikan unggul di wilayah kerjanya.

UPT Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Peternakan dan Perikanan dalam pemeriksaan sampel bahan pangan asal ternak serta pemeriksaan sampel untuk keperluan diagnosa penyakit ternak dan ikan.

3

## Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan peternakan dan perikanan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan daerah dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD merupakan hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas merupakan salah satu SKPD yang mengemban tugas menyediakan pangan terutama pangan yang berasal hewan seperti daging, telur, susu dan berbagai hasil olahannya serta pangan asal ikan dan hasil olahannya. Dalam rangka pemenuhan gizi masyarakat berupa protein hewani asal hewan dan ikan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas telah berpartisipasi melaksanakan pembangunan daerah dengan hasil cukup menggembirakan, hal ini terlihat dari berbagai indikator seperti meningkatnya produksi daging, telur, susu serta produksi hasil-hasil perikanan beserta hasil olahannya, demikian juga semakin meningkatnya konsumsi masyarakat akan ikan.

Namun demikian sebagai daerah strategis dengan perkembangan yang cepat, sampai saat ini masih terdapat permasalahan yang dihadapi baik dari eksternal maupun internal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas meliputi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan penyediaan bibit ternak dan benih ikan baik kualitas maupun kuantitasnya, pencegahan dan pengendalian penyakit ternak dan ikan, pengembangan usaha serta kualitas sumber daya manusia.

Untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas maka dipetakan permasalahan sebagai berikut.

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**  
**Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Jawa Tengah**

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinnakkan Kab Banyumas
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
<b>URUSAN PERTANIAN</b>					
○ Budidaya Peternakan	⇒ Peningkatan produksi hasil ternak	⇒ Produksi daging ⇒ Produksi telur ⇒ Produksi susu	⇒ Ketersediaan anggaran ⇒ Komitmen pemerintah dlm meningkatkan persediaan bibit ternak dan mencegah pemotongan sapi btn produktif	⇒ Kebijakan pemerintahan pusat dan prov ⇒ Kebijakan DPRD ⇒ Penyakit Hewan Menular	Belum maksimalnya koordinasi antar instansi dlm penindakan terhadap pemotongan sapi betina produktif
	⇒ Peningkatan populasi ternak	⇒ Populasi ternak besar ⇒ Populasi ternak kecil ⇒ Populasi ternak unggas			
	⇒ Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)	⇒ Jml akseptor IB ⇒ Jml ternak bunting hasil IB ⇒ Jml ternak lahir hasil IB	⇒ Ketersediaan anggaran ⇒ Ketersediaan SDM ⇒ Sarpras Inseminator ⇒ Keterampilan Inseminator	⇒ Kualitas Semen beku ternak ⇒ Keterampilan peternak	
○ Pencegahan Penyakit Hewan Menular (PHM)	⇒ Pencegahan Penyakit Hewan Menular (PHM)	⇒ Jumlah ternak terkena PHM ⇒ Jumlah wilayah tertular ⇒ Jml angka kematian ⇒ Jml angka kesembuhan ⇒ Jml laporan PHM dari masyarakat	⇒ Ketersediaan anggaran ⇒ Ketersediaan SDM ⇒ Ketersediaan Sarpras pelayanan keswan	⇒ Kebijakan pemerintahan pusat dan prov tentang penyakit hewan ⇒ Penyakit hewan yang ditularkan lewat migrasi burung	Belum maksimalnya koordinasi antar instansi yang menangani penyakit hewan terutama di dalam pencegahan PHM
	⇒ Pengawasan lalu lintas ternak dan obat hewan	⇒ Jumlah keluar masuk ternak dari luar daerah	⇒ Belum adanya Pos lalu lintas ternak Kab Banyumas	⇒ Kebijakan Lalu lintas ternak Provisini Jateng	Belum maksimalnya pelayanan pemeriksaan ternak yg keluar masuk Kab Banyumas



## **Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

---

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumberdaya yang ada dalam tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Rencana Strategis (Renstra) pada prinsipnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan memperhatikan visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih, berpedoman pada RPJPD, RPJMD, RTRW Kabupaten serta memperhatikan RPJMD dan RTRW Provinsi.

Dengan memperhatikan arah pembangunan jangka menengah daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018.

---

## 4.1. Visi dan Misi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas

### 4.1.1. Visi

Misi ke-3 Kepala Daerah terpilih, yaitu **Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi perdesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah**, maka untuk mendukung Misi tersebut Visi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 adalah :

**“ Menjadi Dinas Profesional Untuk Mewujudkan Peternakan dan Perikanan Yang Tangguh, Berwawasan Agribisnis Berbasis Sumberdaya Lokal dan Ramah Lingkungan “**

### 4.1.2 Misi

Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD, dimana rumusan misi dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) pembangunan daerah sehingga akan memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi SKPD.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018, dirumuskan beberapa misi berikut :

1. Menyediakan pangan asal hewan dan ikan yang cukup dan berkualitas dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan kesehatan masyarakat serta kesejahteraan petani ternak dan ikan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal yang berkelanjutan.
2. Menciptakan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha berskala bisnis dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing produk peternakan dan perikanan.
3. Terwujudnya masyarakat yang sehat melalui jaminan mutu dan keamanan hasil peternakan dan perikanan yang beredar di masyarakat.

- 
4. Mengembangkan keahlian dan profesionalisme dalam rangka pelayanan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur, sarana pelayanan, serta pengembangan teknologi informasi berlandaskan iman dan takwa.

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perikanan Kab Banyumas**

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi untuk mewujudkan visi pembangunan selama 5 tahun mendatang serta disusun dalam kerangka yang jelas di setiap misi sehingga menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Peternakan dan Perikanan didasarkan pada potensi wilayah dan sumberdaya yang ada sehingga di dalam penentuan indikator keberhasilan dapat diukur keberhasilannya. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sektor peternakan, kesehatan hewan dan ikan serta perikanan sesuai masing-masing misi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas dapat dijabarkan sebagai berikut.



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Renstra Dinnakkan Kab Banyumas**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Sasaran Tahun					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>MISI 1 :</b>									
<b>Menyediakan pangan asal hewan dan ikan yang cukup dan berkualitas dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan kesehatan masyarakat serta kesejahteraan petani ternak dan ikan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal yang berkelanjutan.</b>									
1	Meningkatkan produksi dan kualitas hasil peternakan dan perikanan perbaikan kualitas budidaya dan pengembangan teknologi	1. Meningkatnya produksi dan kualitas hasil peternakan melalui peningkatan populasi, pengembangan kawasan, efisiensi usaha dan inovasi teknologi	Jumlah produksi daging (ton)	14.823	14.950	15.100	15.325	15.590	15.900
			Jumlah produksi telur (ton)	15.877	16.025	16.225	16.450	16.725	17.050
			Jumlah produksi susu (liter)	2.366.000	2.401.000	2.443.200	2.451.500	2.506.300	2.568.400
			Peningkatan populasi ternak (%/thn)	2	2	2	2	2	2
		2. Meningkatnya derajat kesehatan ternak	Menurunnya angka kesakitan ternak (%/thn)	2	2	2	2	2	2
			Menurunnya angka kematian ternak (%/thn)	1	1	1	1	1	1
		3. Meningkatnya produksi dan kualitas hasil perikanan melalui pengembangan kawasan, peningkatan kualitas budidaya dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	7.243	7.385	7.554	7.713	7.890	8.085
			Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	795	814	830	880	940	1.010
			Meningkatnya derajat kesehatan ikan (%/thn)	5	5	5	5	5	5
		4. Berkembangnya kawasan produksi perikanan (Minapolitan) yang berwawasan lingkungan disertai meningkatnya mutu hasil perikanan sesuai SNI	Jumlah kawasan produksi perikanan (kec)	10	10	10	10	10	10
			Jumlah kelompok yang mendapat sertifikasi CPIB/CBIB	2	2	2	2	2	2



## **Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

---

### **5.1. Rencana Program**

Program merupakan seperangkat kegiatan pembangunan yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan oleh seluruh stakeholder di sektor peternakan dan perikanan secara terurur dan terukur. Di dalam konteks pencapaian tujuan dan sasaran, seluruh kegiatan Dinas akan berada di dalam koridor program-program pembangunan Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dan pembangunan Nasional. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, terdapat beberapa program besar di sektor peternakan dan perikanan yang juga mengacu kepada RPJMD Kabupaten Banyumas. Program-program yang direncanakan dapat dilihat sebagai berikut.

Arah Kebijakan dan strategi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018 yang telah diuraikan akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan 2013-2018 sebagai berikut :

#### **5.1.1. Urusan Pertanian**

Urusan pertanian akan mengampu program di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, bertujuan mendorong usaha peternakan untuk lebih produktif dan efisien, memiliki nilai tambah dan berdaya saing yang tinggi baik di pasar.

2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan terutama Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan penyakit individual serta peningkatan kualitas pangan asal hewan (PAH) dan bahan asal hewan (BAH).
3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, bertujuan meningkatkan sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan guna memperoleh margin pemasaran dan nilai tambah pengolahan hasil produk peternakan.
4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam rekayasa teknologi dalam rangka efisiensi usaha peternakan

### **5.1.2. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Urusan Kelautan dan Perikanan mengampu program yang dilaksanakan oleh Bidang Perikanan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, bertujuan meningkatkan produksi dan mutu hasil perikanan baik perikanan budidaya maupun tangkap.
2. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar, bertujuan mengembangkan perikanan budidaya sesuai komoditas unggulan yang berbasis kawasan serta meningkatnya ketaatan dan ketertiban dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan.
3. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan kualitas produk pengolahan hasil perikanan melalui peningkatan ketrampilan dan pengembangan akses pemasaran.

### **5.1.3. Non Urusan**

Untuk Non urusan meliputi kegiatan yang ada di Sekretariat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas dalam mendukung tugas pokok dan fungsi, pemeliharaan sarpras operasional guna terwujudnya kenyamanan dalam pelayanan pada masyarakat.
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan tujuan tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja pada Dinas guna penyediaan dokumen operasional untuk mendukung capaian kinerja organisasi.

---

## 5.2. Rencana Kegiatan

Selanjutnya operasional kebijakan pembangunan peternakan dan perikanan Kabupaten Banyumas dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dimana kegiatan tersebut secara teknis sejalan dengan program Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng serta program Pemerintah Kabupaten Banyumas.

### 5.2.1. Urusan Pertanian

Urusan pertanian dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a) Kegiatan Pembangunan Sarpras Pembibitan ternak
  - b) Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat
  - c) Kegiatan Peningkatan Mutu Bibit Ternak
  - d) Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan
  - e) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Produksi Peternakan
2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - b) Kegiatan Penyidikan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak
  - c) Kegiatan Revitalisasi RPH
  - d) Kegiatan Pembangunan RPH Ruminansia /Unggas
3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a) Kegiatan Promosi Hasil Produksi Peternakan Unggulan
  - b) Kegiatan Pembangunan Sarpras Pasar Produksi Hasil Peternakan
4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a) Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna
  - b) Kegiatan Pengadaan Sarpras Teknologi Peternakan Tepat Guna

---

### 5.2.2. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dilaksanakan melalui kegiatan.
  - a) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
  - b) Kegiatan Penyidikan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ikan
  - c) Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
2. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Budidaya Perikanan, dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a) Kegiatan Minabisnis.
3. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar, dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Minapolitan
  - b) Kegiatan Penebaran ikan di Perairan Umum
  - c) Kegiatan Agropolitan/Minapolitan
  - d) Kegiatan Gemarikan

### 5.2.3. Non Urusan

Sedangkan untuk non urusan yang merupakan pendukung kinerja Dinas dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a) Kegiatan Ketatausahaan
  - b) Kegiatan Operasional UPT RPH
  - c) Kegiatan Operasional UPT BBI
  - d) Kegiatan Operasional Lab Kesmavet
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a) Kegiatan Fasilitasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
  - b) Kegiatan Penyusunan Database

**Tabel 5.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										LO KASI				
							Tahun 1 (2014)		Tahun 2 (2015)		Tahun 3 (2016)		Tahun 4 (2017)		Tahun 5 (2018)			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		target	Rp.		
1. Meningkatkan produksi hasil peternakan dan perikanan melalui perbaikan kualitas bibit ternak dan mutu hasil perikanan serta menjaga derajat kesehatan hewan dan ikan	1. Meningkatnya produksi dan kualitas hasil peternakan melalui peningkatan populasi, efisiensi usaha dan inovasi teknologi	- Produksi daging (ton)	02.01.22	1. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		14.823,1	14.971,3	50.000	15.158,5	50.000	15.385,8	50.000	15.655,1	50.000	15.968,2	50.000	15.968,2	50.000			
		- Produksi telur (ton)	02.01.22.003		1. Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	- Penyebaran ternak besar (ekor)	15.877,0	50.00	50.00	16.236,2	50.00	16.479,7	50.00	16.768,1	50.00	17.103,5	50.00	17.103,5	50.00		
		- Produksi susu (ltr)		- Penyebaran ternak kecil (ekor)																	
		- Populasi ternak (ekor)		- Penyebaran ternak unggas (ekor)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						JUMLAH KEGIATAN - 1		14.971,3	50.000	15.158,5	50.000	15.385,8	50.000	15.655,1	50.000	15.968,2	50.000	15.968,2	50.000		
				- Jumlah kelompok terlatih rekayasa teknologi peternakan (klmpok)	02.01.24	2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam rekayasa teknologi dalam rangka efisiensi usaha	14.823,1	14.971,3		15.158,5		15.385,8		15.655,1		15.968,2		15.968,2		
				1. Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna	02.01.24.005	- Pelatihan teknologi pakan (klmpk)	15.877,0	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
			- Pelatihan teknologi perbibitan (klmpk)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						JUMLAH KEGIATAN - 1		14.971,3	50.000	15.158,5	50.000	15.385,8	50.000	15.655,1	50.000	15.968,2	50.000	15.968,2	50.000		



## **Indikator Kinerja Dinnakkan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

---

Penetapan indikator kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas, maka indikator kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja Dinnakkan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.**

No	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD ( 2013 )	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1 ( 2014 )	Tahun 2 ( 2015 )	Tahun 3 ( 2016 )	Tahun 4 ( 2017 )	Tahun 5 ( 2018 )	
<b>A</b>	<b>URUSAN PERTANIAN</b>							
<b>I</b>	<b>Bidang Peternakan</b>							
1	Produksi hasil peternakan :							
	- Produksi Daging (ton)	14.823	14.971	15.158	15.385	15.655	15.968	77.137
	- Produksi Telur (ton)	15.877	16.035	16.235	16.578	16.868	17.205	82.921
	- Produksi Susu (liter)	2.365.736	2.401.000	2.443.000	2.491.000	2.547.000	2.610.000	12.492.000
2	Penyebaran ternak :							
	- Penyebaran ternak besar (ekor)		20	20	20	20	20	100
	- Penyebaran ternak kecil (ekor)		200	200	200	200	200	1.000
	- Penyebaran ternak unggas (ekor)		100	100	100	100	100	500
3	Peningkatan kualitas bibit ternak :							
	- Jml kelahiran sapi hasil IB (ekor)	2.500	500	500	500	500	500	2.500
	- Jml kelahiran kambing hasil IB (ekor)	500	100	100	100	100	100	500
4	Pembinaan dan pengembangan usaha peternakan :							
	- Pembinaan usaha peternakan (keg)	50	10	10	10	10	10	50
	- Penyaluran kredit untuk usaha peternakan (klmpk)	10	2	2	2	2	2	10
	- Pelatihan kelompok pengolah hasil peternakan (klmpk)	10	2	2	2	2	2	10
	- Partisipasi pameran / ekspo hasil peternakan (keg)	5	2	2	2	2	2	10
	- Lomba kelompok bidang peternakan (keg)	5	1	1	1	1	1	5





## Penutup

---

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018 telah disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018 dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap bidang peternakan dan perikanan.

Untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan peternakan dan perikanan di Kabupaten Banyumas, perlu melibatkan berbagai komponen masyarakat selaku *stake holder* dan meningkatkan sinergi seluruh potensi sumber daya sehingga pemerintah lebih berperan dalam memfasilitasi, mendorong dan memberdayakan masyarakat. Lebih lanjut kerjasama antara Bidang peternakan, perikanan serta kesehatan hewan dan ikan lingkup Dinnakkan, antara SKPD yang terkait, antara Dinas Peternakan dan perikanan Kabupaten dengan Dinas vertikal di Provinsi maupun Pusat perlu dijalin mengingat kompleksnya permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga membutuhkan pelibatan berbagai fungsi dan kebijakan.

Untuk mewujudkan berbagai perubahan diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya, oleh karena itu dengan perencanaan yang lebih terarah dan didukung iklim yang kondusif, maka pembangunan peternakan dan perikanan ke depan dapat dilakukan secara sistemik, bertahap dan berkesinambungan guna menjadi Dinas Profesional untuk mewujudkan peternakan dan perikanan yang tangguh, berwawasan agribisnis berbasis sumberdaya lokal dan ramah lingkungan.